

SINOPSIS

Latar belakang penelitian ini adalah melihat bahwa demokrasi saat ini menempati posisi strategis dalam perkembangan politik suatu Negara. Demokrasi dianggap menjadi sebuah pilihan terbaik dari berbagai ideologi karena cenderung lebih makmur daripada negara-negara dengan pemerintahan yang tidak demokratis. Akan tetapi walaupun demokrasi sebagai sebuah ideologi yang dinyatakan terbaik ternyata demokrasi tersebut membawa pro-kontra pada sebagian pemikir dan organisasi masyarakat lebih khusus lagi kepada pemikir dan organisasi Islam. Oleh karenanya peneliti berusaha melihat lebih jauh pandangan organisasi Islam khususnya HTI terhadap demokrasi maupun aspeknya seperti kedaulatan rakyat, pemilihan umum dan kebebasan sipil.

Dalam penelitian ini, Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif untuk mengetahui secara mendalam mengenai pandangan Hizbut Tahrir Indonesia terhadap demokrasi dalam aspek kedaulatan rakyat, pemilihan umum dan kebebasan sipil. Sumber-sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan berupa interview atau wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah cara menulis ataupun mengetik data yang diperoleh dari lapangan dengan rapi, terperinci dan sistematis setiap selesai mengumpulkan data. Setelah reduksi data akan dilakukan display data dimana data yang telah direduksi disajikan untuk membantu dalam penarikan kesimpulan.

Dari hasil penelitian ini didapatkan bahwa secara rinci HTI menolak demokrasi baik demokrasi itu sendiri maupun dalam aspek-aspeknya yaitu kedaulatan rakyat, pemilihan umum dan kebebasan sipil. Dinyatakan bahwa demokrasi adalah sistem rusak yang dikendalikan oleh korporasi-korporasi besar dan tidak peduli pada kepentingan rakyat. Aspek pertama, kedaulatan rakyat tidak sesuai dengan hukum Islam karena adanya penegasian hukum-hukum Allah. Aspek kedua, pemilihan umum dalam demokrasi mengakibatkan seorang yang tidak berkompeten atau seorang jahil akan mencalonkan diri yang akan mengakibatkan si calon mempunyai visi dan misi yang tidak jelas dan tidak berupaya menegakkan hukum Islam. Aspek ketiga, kebebasan sipil, ide kebebasan dalam demokrasi sangat bertentangan dengan hukum Islam karena akan mengakibatkan seorang individu berbuat sekehendaknya dan mengakibatkan kerusakan.

Kesimpulan yang diambil peneliti adalah HTI menganggap demokrasi maupun aspek-aspeknya adalah sistem kufur yang bertentangan dengan hukum-hukum Islam sehingga dilarang mengadopsi sistem tersebut. Adapun rekomendasinya adalah HTI seharusnya memberikan jalan alternatif lain yang terlepas dari demokrasi. HTI harus memberikan kontribusi diluar demokrasi.